

## **BAB V** **PENUTUP**

### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan di Jorong Timbo Abu, Nagari Simpang Timbo Abu Kaji mengenai usaha budidaya kopi oleh Kelompok Tani Tekad Berkarya (KTTB), dapat disimpulkan bahwa aktivitas budidaya kopi yang dilakukan kelompok ini merupakan bagian dari strategi pertanian kolektif yang berbasis pada nilai-nilai adat, resiliensi ekonomi, dan keberlanjutan jangka panjang. Kesimpulan ini dirumuskan berdasarkan tiga rumusan masalah, sebagai berikut:

1. Usaha Kelompok Tani Tekad Berkarya dalam membudidayakan kopi di kawasan hutan menunjukkan orientasi agraria yang tidak hanya mengejar hasil panen, tetapi juga mempertahankan identitas budaya dan hak kolektif atas tanah kaum. Budidaya dilakukan dengan sistem agroforestri, mengintegrasikan tanaman kopi dengan pohon pelindung dan tanaman keras lainnya. Meskipun hasilnya belum mampu mencukupi kebutuhan ekonomi harian, budidaya kopi tetap dijalankan sebagai bentuk keberlanjutan pengelolaan lahan dan simbol pengikat komunitas.
2. Strategi yang digunakan Kelompok Tani Tekad Berkarya untuk mengembangkan usaha budidaya kopi mencakup diversifikasi sumber ekonomi melalui tanaman semusim dan kerja upahan, serta penguatan solidaritas sosial dalam bentuk gotong royong, pembagian peran, dan partisipasi keluarga. Strategi ini dibentuk secara adaptif melalui pendekatan

kolektif dan pengetahuan lokal yang diwariskan lintas generasi. Kelompok juga membangun jejaring kolaborasi dengan pihak luar, meskipun masih menghadapi kendala struktural seperti perizinan dan keterbatasan akses kebijakan.

3. Dampak usaha budidaya kopi terhadap kehidupan petani tidak hanya berkaitan dengan pendapatan, tetapi juga memperkuat ketahanan ekonomi melalui portofolio nafkah majemuk. Kopi diposisikan sebagai tabungan jangka panjang, sementara tanaman semusim dan kerja luar menjadi penyangga kebutuhan harian. Strategi ini sejalan dengan konsep subsistence ethic dari James C. Scott (1985), di mana petani lebih mengutamakan keberlangsungan hidup dan otonomi lokal dibanding akumulasi keuntungan maksimal. Dalam konteks ini, usaha kopi menjadi sarana pertahanan halus terhadap tekanan pasar dan sistem agraria formal yang tidak berpihak pada petani kecil.

## **B. Saran**

### **1. Untuk Kelompok Tani Tekad Berkarya**

- Perlu dilakukan penguatan kapasitas dalam aspek pengolahan pascapanen dan pemasaran produk kopi, agar nilai tambah dari produk dapat dinikmati langsung oleh kelompok secara berkelanjutan.
- Disarankan untuk membentuk koperasi atau badan usaha kelompok guna mengelola usaha bersama secara kolektif, serta mendukung pemberdayaan ekonomi dan regenerasi petani kopi muda.

## 2. Untuk Pemerintah Daerah dan Instansi Terkait

- Perlu mengembangkan program dukungan khusus bagi petani kopi, seperti akses terhadap bibit unggul (termasuk varietas Robusta dan Arabika Gayo), subsidi sarana produksi, peningkatan infrastruktur jalan kebun, serta pelatihan teknis secara berkala.
- Pemerintah perlu menyusun kebijakan afirmatif yang sensitif terhadap sistem sosial dan adat setempat, agar keberadaan kelompok tani tidak tersingkir oleh ekspansi komoditas dominan yang tidak sesuai dengan karakteristik lokal.

## 3. Untuk Generasi Muda

- Diperlukan program sosialisasi dan pelatihan berbasis kreativitas generasi muda, seperti wisata edukatif kebun kopi, pelatihan barista, pengolahan hasil, dan promosi digital. Tujuannya adalah membuka ruang keterlibatan generasi muda dalam sektor pertanian kopi sebagai sektor masa depan yang menjanjikan secara ekonomi dan bermakna secara budaya.

## 4. Untuk Akademisi dan Lembaga Mitra

- Diharapkan adanya keterlibatan aktif dalam bentuk pendampingan, penguatan kapasitas, serta riset kolaboratif jangka panjang yang mampu mendorong penemuan lokal dan formulasi strategi keberlanjutan pertanian kopi berbasis nilai-nilai lokal komunitas.

Penelitian ini menunjukkan bahwa kelompok tani seperti Kelompok Tani Tekad Berkarya tidak hanya mempraktikkan ekonomi pertanian, tetapi juga

memperjuangkan keberlanjutan sosial, budaya, dan kelembagaan yang saling terkait. Oleh karena itu, kebijakan pembangunan pedesaan yang adil dan kontekstual perlu berangkat dari pengakuan terhadap model-model keberdayaan lokal semacam ini, bukan menggantikannya.

